



20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan

• Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
 - a) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan sarana perekonomian.
 - b) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan potensi perekonomian.
 - c) Analisis dan penyiapan rancangan pengembangan usaha perekonomian.
 - d) Monitoring, evaluasi dan koordinasi perekonomian daerah.
 - e) Fasilitasi koordinasi Kebijakan PDAM.
 - f) Pengkajian dan penelitian pemanfaatan dana promosi pariwisata.
 - g) Kajian komoditas pedagang asongan.
 - h) Penyusunan rancangan kebijakan pengendalian, pelaporan dan bantuan pembangunan.
 - i) Fasilitasi, monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan.
 - j) Penyusunan data dan inventarisasi program pembangunan.
 - k) Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.
 - l) Penyiapan alokasi distribusi bantuan aspal.
 - m) Pengkajian opini masyarakat.
 - n) Pengkajian dan penyusunan kebijakan kehumasan.
 - o) Fasilitasi, evaluasi dan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat.
 - p) Fasilitasi pelaksanaan *public hearing* dalam rangka sosialisasi penetapan perda.
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan.



- b) Fasilitasi rapat dan tamu
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi.
 - e) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - f) Belanja perawatan dan pengobatan.
 - g) Penyediaan ATK, barang cetakan dan penggandaan.
 - h) Koordinasi dan konsultasi.
 - i) Penyediaan jasa pengamanan.
 - j) Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 - k) Pengadaan asuransi dewan.
 - l) Penyusunan angka kredit petugas fungsional.
 - m) Pembinaan Jasa Konstruksi.
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor
- a) Pengadaan sarana dan prasarana kerja.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja.
 - c) Pengadaan pakaian dinas DPRD dan perlengkapannya.
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana kerja.
- 4) Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, pencapaian kinerja dan keuangan
- a) Fasilitasi keuangan bupati, sekda dan assekda.
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran.
 - c) Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - d) Monitoring anggaran
 - e) Pembinaan penatausahaan keuangan daerah.
- 5) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
- a) Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi perkotaan.
 - b) Penegasan batas wilayah antar kecamatan.
 - c) Pembinaan dan monitoring pembuatan siklus tahunan desa.
 - d) Pembinaan penyelenggaraan dan administrasi desa.
 - e) Pembinaan pengelolaan alokasi dana desa.
 - f) Pelayanan administrasi pembangunan.

-
- g) Pembinaan dan pengembangan aparatur.
 - 6) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
 - a) Analisa dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah.
 - b) Fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
 - c) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
 - d) Penyelenggaraan Forum Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkehjapoli).
 - e) Rapat koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan.
 - 7) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a) Monitoring, evaluasi, dan analisis kelembagaan daerah.
 - b) Monitoring, evaluasi dan analisis ketatalaksanaan.
 - c) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan kelembagaan daerah.
 - d) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan standarisasi sarana dan prasarana kerja.
 - e) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pelayanan publik.
 - f) Penyusunan SOP Kantin Setda.
 - 8) Program Kerja Sama Pembangunan
 - a) Kerjasama dan koordinasi antar kabupaten/provinsi.
 - b) Penyusunan naskah kerjasama pemda dan desa.
 - 9) Program pembentukan produk hukum, penegakan hukum dan HAM
 - a) Pengkajian produk-produk hukum.
 - b) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
 - c) Penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati.
 - d) Dokumentasi dan publikasi hukum.
 - e) Sosialisasi peraturan perundangan-undangan.
 - f) Fasilitasi perumusan produk hukum daerah dan pembahasan.
 - g) Fasilitasi pendampingan pansus non raperda dan renja dewan.
 - h) Fasilitasi pelaksanaan rapat kerja/rapat koordinasi dan penyusunan risalah.
 - i) Pembahasan produk hukum daerah.



- j) Pemantauan perijinan dan penegakan perda.
- 10) Program pelayanan dan bantuan hukum
 - a) Pengembangan sistem informasi hukum.
 - b) Pelayanan bantuan hukum.
 - c) Penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara.
 - d) Studi lanjutan permasalahan hukum.
 - e) Pengkajian perumusan bidang kesra.
- 11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a) Fasilitasi operasional dan penataan perijinan di UPT-PSA.
 - b) Fasilitasi Rapat Paripurna Istimewa.
 - c) Fasilitasi pendamping Panitia tetap DPRD.
 - d) Penjaringan aspirasi masyarakat masa reses.
 - e) *Public hearing*
 - f) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta.
 - g) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda.
 - h) Kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana Setda dan ruang pelayanan umum.
 - i) Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Swadaya Masyarakat.
 - j) Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong.
 - k) Fasilitasi TMMD
 - l) Monitoring pembangunan
 - m) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
 - n) Kajian Pengembangan Kecamatan
 - o) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
 - p) Pembinaan pelayanan umum dan administrasi desa.
 - q) Rakor kependudukan desa
 - r) Sosialisasi perijinan dan tinjau lokasi HO, IMB.
 - s) Koordinasi penyelenggaraan kewenangan Perindagkop di kecamatan.

- t) Pelayanan Perizinan Perdagangan
 - u) Pelayanan perizinan usaha industri
 - v) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - w) Studi Orientasi pelaksanaan tugas Perindagkop
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
- a) Pelantikan DPRD
 - b) Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu
 - c) Peningkatan kinerja kepanitiaan dewan
 - d) Peningkatan kapasitas kelegislatifan dewan
 - e) Kunjungan kerja komisi
 - f) Pembinaan BPD dan LKD
- 13) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- a) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas OPD
- 14) Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- a) Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi
 - b) Intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
 - c) Pendataan wajib pajak hotel dan restoran non pembuku
- 15) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai
 - b) Peningkatan kualitas aparat kehumasan
 - c) Peningkatan kapasitas aparat sekretariat DPRD
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, seminar dan pendampingan kunjungan kerja anggota DPRD
 - e) Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya
 - f) Pelatihan manajemen arsip
 - g) Penilaian angka kredit pegawai fungsional penyuluh perindustrian
 - h) Penyusunan buku identifikasi masalah IKM 4 komoditi
 - i) Bimbingan penyuluhan terhadap industri kecil dan rumah tangga



-
- 16) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah
 - a) Penyusunan profil desa
 - b) Penyusunan profil pemuda dan olah raga
 - c) Penyusunan monografi kecamatan
 - d) Pendataan kesenian dan pendidikan
 - e) Pemutahiran data PMKS dan PSKS
 - f) Updating dan validasi data KB, Sosial dan Ketenagakerjaan
 - g) Penyiapan jaringan berbasis komputer/LAN dan penyusunan database P3BA
 - h) Pengelolaan data statistik kebudayaan dan pariwisata
 - i) Pengelolaan web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - j) Penyusunan profil usaha perdagangan Kabupaten Sleman
 - k) Penyusunan buku panduan dan pengolahan data
 - l) Penyusunan profil industri menengah dan besar
 - m) Penyusunan profil pengembangan sentra industri kecil
 - n) Penyusunan profil komoditi unggulan Kabupaten Sleman
 - o) Updating database koperasi
 - p) Pemetaan industri hasil tembakau
 - q) Verifikasi nama-nama rupabumi yang telah terinventarisir dan penyusunan gasetir Kabupaten Sleman
 - r) Penyusunan database dan profil Dinal Pol PP dan Tibmas
 - s) Pengembangan SIM Ketertiban
 - 17) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah dengan kegiatan pembinaan kearsipan dan perpustakaan desa
 - 18) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - a) Penunjang bulan bhakti gotong royong
 - b) Pemantauan, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
 - c) Pendampingan PNPM
 - d) Koordinasi dan pembinaan KIKM
 - e) Fasilitasi lomba antar wilayah

-
- 19) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- a) Penerbitan Suara Parlemen, booklet, leaflet dan album kegiatan dewan
 - b) Pelayanan pers, dialog interaktif , keprotokolan dan audio visual kegiatan dewan 2004-2009
 - c) Pengelolaan dan pelayanan informasi melalui internet dan anjungan
 - d) Penyusunan analisis dan informasi data pertanian dan kehutanan
 - e) Pengelolaan web pertanian dan kehutanan berupa terlaksananya pengelolaan web pertanian dan kehutanan
 - f) Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian dan kehutanan
 - g) Pembuatan peta potensi pertanian dan kehutanan
 - h) Penyusunan informasi perkembangan sektor Perindagkop Kabupaten Sleman
 - i) Promosi potensi kerajinan
 - j) Penyebarluasan pedoman pengelolaan koperasi
 - k) Publikasi media internal
 - l) Publikasi media massa
 - m) Pengembangan materi informasi melalui cyber media
 - n) Fasilitasi pameran
 - o) Penyusunan dan pengelolaan dokumentasi serta komputerisasi perpustakaan Setda
 - p) Media Relation
 - q) Fasilitasi dan koordinasi jaringan informasi
 - r) Pelayanan keprotokolan
 - s) Pengembangan layanan informasi kepada masyarakat berbasis sms
- 20) Program penataan tertib pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui pemantauan dan penyelesaian masalah pertanahan
- 21) Program Peningkatan Tertib Adminstrasi Pertanahan melalui pemantauan dan pengendalian tata guna tanah dan penyelesaian permasalahan



- 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur
- 23) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a) Fasilitas penyelenggaraan pemilu
 - b) Monitoring pelaksanaan kampanye
 - c) Monitoring pelaksanaan pemilu
 - d) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - e) Pembinaan, monitoring pemilihan kepala desa/perangkat serta dukuh
 - f) Fasilitas peningkatan pendidikan politik masyarakat
 - g) Implementasi wawasan kebangsaan
- 24) Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dengan kegiatan pembinaan dan penanggulangan bencana
- 25) Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan fasilitasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan
- 26) Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan fasilitasi premi JPKM pegawai tidak tetap (PTT)
- 27) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan desa
 - b) Monitoring evaluasi pengendalian pembangunan di kecamatan
 - c) Penyusunan RPJMDes
 - d) Fasilitas Forum Komunikasi Perkotaan
- 28) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a) Pembinaan, pendataan dan fasilitasi penyelesaian masalah lingkungan hidup
 - b) Monitoring dan evaluasi kegiatan penambangan
- 29) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan kajian kecamatan sebagai pusat kebudayaan
- 30) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - a) Fasilitas pembinaan kesenian dan kebudayaan
 - b) Gelar potensi budaya

- 31) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pendataan kemiskinan
- 32) Program Pengembangan potensi Daerah
 - a) Fasilitasi pengembangan potensi daerah
 - b) Pembinaan dan monitoring UKM
 - c) Pembinaan pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi
- 33) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan monev dan koordinasi BUKP.
- 34) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a) Kajian arah kebijakan pengembangan industri Kabupaten Sleman.
 - b) Pendataan, monitoring dan evaluasi industri kecil, perdagangan dan koperasi
- 35) Program penyiapan sumberdaya, sarana, prasarana usaha ekonomi
 - a) Monitoring, evaluasi kelompok usaha masyarakat
 - b) Fasilitasi pengembangan Taman Kuliner dan Los Perdagangan Manggung
 - c) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Pasar Condongcatur
 - d) Fasilitasi penguatan modal pertanian dan kehutanan
 - e) Penunjang penguatan dan penguatan modal bidang industri
 - f) Penunjang dan monitoring penguatan modal koperasi IKM
 - g) Penunjang dan monitoring pensertifikatan tanah UMK
 - h) Studi orientasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk potensi wilayah
- 36) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga:
 - a) Fasilitasi dan evaluasi olahraga karyawan dan masyarakat
 - b) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 37) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan dan lansia
- 38) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak dengan kegiatan fasilitasi perlindungan anak



-
- 39) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - a) Fasilitasi, evaluasi program pemberdayaan perempuan
 - b) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang perekonomian bagi kelompok PKK padukuhan
 - c) Fasilitasi pembinaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
 - 40) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - a) Fasilitasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b) Fasilitasi dan kajian pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan
 - 41) Program Peningkatan Kualitas Keagamaan
 - a) Fasilitasi dan pembinaan keagamaan pejabat dan PNS
 - b) Kajian pembinaan dan evaluasi pondok pesantren
 - c) Pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan
 - d) Fasilitasi kerukunan umat beragama
 - e) Pembinaan dan fasilitasi Rois dan pelatihan imam dan khotib
 - f) Kajian pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
 - g) Pembinaan dan fasilitasi GPPA
 - h) Fasilitasi dan evaluasi Badan Amil Zakat (BAZ)
 - i) Fasilitasi pembinaan keagamaan masyarakat
 - 42) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - a) Fasilitasi dan evaluasi BNK Sleman
 - b) Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan NAPZA
 - 43) Program Peningkatan Kualitas KB, KS dan KRR
 - a) Monev dan fasilitasi pembinaan kelompok USEP/KUBE.
 - b) Pembinaan keluarga sejahtera



-
- 44) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - a) Analisis kebijakan pengembangan pangan lokal
 - b) Fasilitasi koordinasi ketahanan pangan
 - c) Pembinaan dan Fasilitasi pemberdayaan P3A
 - d) Pembinaan dan Fasilitasi KTNA
 - 45) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a) Koordinasi dan evaluasi pasar hewan Gamping
 - b) Penyusunan buku kuliner makanan tradisional Kabupaten Sleman
 - c) Monitoring makanan kadaluarsa
 - d) Pendataan dan pelaporan penggunaan gudang
 - 46) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - a) Fasilitasi pameran potensi daerah tingkat kabupaten
 - b) Kabupaten ekspo
 - 47) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a) Pembinaan, pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah
 - b) Pembinaan pertanahan sipil dan perlindungan masyarakat
 - c) Pembinaan dan penegakan perda
 - d) Pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh dan pengisian pamong desa
 - e) Pemutakhiran data OT dan WNA
 - 48) Program Peningkatan Pembinaan Generasi Muda
 - a) Fasilitasi kegiatan pemuda dan remaja
 - b) Kajian dan pembinaan kepemimpinan bagi pemuda
 - c) Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan
 - 49) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
 - 50) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Pembinaan UKS
 - b) Pendampingan pelaksanaan TPKJM

- 51) Program Pembinaan PKL dan Asongan dengan pembinaan Pedagang Kali Lima
- 52) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal dengan kegiatan pembinaan pelaksanaan pendidikan non formal
- 53) Program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
- 54) Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan dengan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
- 55) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a) Pemasyarakatan hasil pembangunan pertanian
 - b) Fasilitasi forum komunikasi pertanian
- 56) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a) Stimulan kelompok berprestasi pertanian dan kehutanan
 - b) Penunjang pertanian wisata
 - c) Pemberdayaan kelompok dan koordinat

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
 - a) Tersusunnya 1 dokumen study kelayakan Rumah Potong Hewan.
 - b) Tersusunnya 10 buku kajian arah pengembangan promosi daerah, tersusunnya 1 dokumen agenda promosi daerah, tersedianya 1 paket pendukung materi promosi dan tersusunnya 10 buku kajian arah pengembangan investasi.
 - c) Tersusunnya 1 dokumen database usaha informal (bidang transportasi) dan tersusunnya 1 dokumen monitoring dan evaluasi dan koordinasi PKL.
 - d) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan koordinasi perekonomian daerah sebanyak 30 kali.

- e) Tersusunnya 1 dokumen monitoring, evaluasi dan koordinasi perekonomian daerah.
- f) Tersusunnya 1 dokumen kajian dan penelitian pemanfaatan dana pariwisata.
- g) Tersusunnya 1 dokumen kajian komoditas pedagang asongan.
- h) Tersusunnya 1 draft Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, dan 4 draft ketentuan teknis bantuan stimulan pembangunan fisik swadaya masyarakat (bantuan aspal, gotong royong, pengairan dan pasar desa).
- i) Terlaksananya 14 kali koordinasi program pembangunan, 4 kali koordinasi pengendalian pembangunan, 60 kali pengendalian pelaksanaan pembangunan dan 12 kali koordinasi pelaporan pembangunan.
- j) Terlaksananya 20 kali koordinasi program pembangunan
- k) Tersusunnya 50 Buku laporan pelaksanaan pembangunan
- l) Terlaksananya cek lokasi permohonan bantuan aspal di 17 kecamatan dan evaluasi dan verifikasi proposal permohonan bantuan aspal sebanyak 250 proposal.
- m) Terlaksananya analisa persepsi masyarakat Sleman tentang pendidikan dan identifikasi permasalahan masyarakat dan kritikan melalui media selama 12 bulan sebanyak 449 masalah.
- n) Tersusunnya 1 draft mekanisme tata upacara pemakaman mantan pejabat, PNS dan perangkat desa, 1 draft mekanisme pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan 125 buku pedoman keprotokolan.
- o) Terlaksananya fasilitasi kegiatan PMI, KPAD, PKTP sebanyak 6 kali, kegiatan TP UKS Kecamatan, Kabupaten dan sekolah sebanyak 16 kali, koordinasi, monitoring dan evaluasi GSI sebanyak 6 kali.
- p) Terlaksananya *public hearing* dalam rangka sosialisasi penetapan perda.



2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Terlaksananya fasilitasi administrasi pimpinan sebanyak 25 surat, penataan arsip in aktif sebanyak 3500 berkas arsip, pengelolaan 3000 arsip penting Bupati, Sekda dan Assekda dan pembayaran honor 1 orang petugas arsip Setda, surat menyurat di Setwan sebanyak 1.293 surat dan arsip sebanyak 6 boks, pengelolaan perpustakaan DPRD selama 12 bulan, terlaksananya pelayanan administrasi kecamatan selama 1 2bulan, pengelolaan perpustakaan dan kearsipan selama 12 bulan, pembelian buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 1 paket, pembelian buku pertanian sebanyak 1 paket dan terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 12 bulan.
- b) Terlaksananya fasilitasi rapat dan tamu di setda dan set DPRD sejumlah 16.149 orang, terfasilitasinya tamu di kecamatan sebanyak 381 kali.
- c) Terlaksananya pembayaran honor tenaga kebersihan selama 12 bulan
- d) Terlaksananya penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi listrik, telekomunikasi, air, gas dan media cetak selama 12 bulan
- e) Terlaksananya pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang selama 12 bulan
- f) Terlaksananya perawatan dan pengobatan Bupati/Wabup, Mantan Bupati serta Mantan Wabup
- g) Terlaksananya pembelian ATK, barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan
- h) Terlaksananya perjalanan dinas untuk 799 orang dan terlaksananya perjalanan dinas kecamatan sebanyak 1.076 kali
- i) Tersedianya jasa pengamanan dan pembayaran honor 40 orang petugas keamanan.



- j) Terkelolanya administrasi kepegawaian selama 12 bulan, terbayarnya honor pegawai tidak tetap sekretariat DPRD sebanyak 3 orang, terlaksananya pembinaan kepegawaian di kecamatan sebanyak 168 kali
 - k) Pengadaan asuransi dewan sebanyak 95 orang anggota dewan, terdiri dari 45 anggota DPRD Periode 2004-2009 dan 50 Anggota DPRD Periode 2009-2014
 - l) Penyusunan angka kredit 120 orang penyuluh dan 18 orang PMHP
 - m) Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi selama 12 bulan dan pengeloan IUJK untuk 12 bulan
- 3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor
- a) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas, alat kantor, mebel, alat studio, alat kepustakaan setda, DPRD dan kecamatan sebanyak 19 paket, operasional BBM roda dua dan roda empat selama 12 bulan, terpeliharanya kendaraan roda dua dan roda empat untuk 12 bulan, terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja selama 12 bulan, terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor selama 12 bulan dan terlaksananya pembayaran sewa tanah ubtj Poskeswan, BBI, UPTD dan lain-lain di 11 lokasi.
 - b) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kerja setda, DPRD dan kecamatan, terlaksananya pengadaan sarana kerja (komputer, gordyn, almari, rak arsip, filing kabinet, notebook, meja kursi), pengadaan GPS 1 unit, pembuatan sumur peresapan sebanyak 5 unit, pengadaan implant kid sebanyak 25 unit, pengadaan Gynbed sebanyak 4 unit, pengadaan sepeda motor sebanyak 56 unit dan pengadaan datasrib sebanyak 2 buah.



- c) Terlaksananya pengadaan PSL anggota DPRD sebanyak 50 stel, PSH anggota DPRD sebanyak 45 stel, lencana dan papan nama sebanyak 100 buah.
- d) Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana kerja selama 12 bulan
- 4) Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, pencapaian kinerja dan keuangan
 - a) Terlaksananya pengelolaan keuangan Bupati, Sekda dan Assekda selama 12 bulan, terfasilitasinya keuangan pimpinan dan SPJ untuk 9 bagian selama 12 bulan.
 - b) Tersusunnya RKA/DPA SKPD, Renja, Target kinerja, DPAP Setda, Set DPRD, 7 Dinas dan Kecamatan sebanyak 93 dokumen, input data perhitungan anggaran Setda dan penyusunan laporan realisasi anggaran Setda, Set DPRD, 7 dinas dan kecamatan sebanyak 48 dokumen, terlaksananya Musrenbang di 17 Kecamatan.
 - c) Tersusunnya LAKIP, laporan bulanan dan laporan tahunan sebanyak 121 dokumen dan monitoring/evaluasi kegiatan selama 11 bulan.
 - d) Terlaksananya monitoring evaluasi anggaran 2009 selama 2 semester
 - e) Terlaksananya pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah sebanyak 2 kali
- 5) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
 - a) Tersusunnya 18 buku data administrasi kota di 17 kecamatan
 - b) Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dan penelitan dokumen batas wilayah, tersusunnya 1 dokumen batas wilayah, terlaksananya penentuan 99 titik garis batas sementara dan 99 titik penegasan wilayah, tersusunnya 3 dokumen dan peta kerja pelacakan titik batas wilayah antara Kecamatan Sleman, Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Mlati; terwujudnya 1



dokumen dan 63 pilar batas antara Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta dan antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo; dan terpeliharanya peta desa di 86 desa.

- c) Terbinanya siklus tahunan desa sebanyak 46 kali.
 - d) Terbinanya administrasi desa sebanyak 8 kali.
 - e) Terbinanya pengelolaan ADD sebanyak 35 kali.
 - f) Tersusunnya Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan di lingkungan Pemda Sleman sebanyak 44 kegiatan, Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari luar Pemda Sleman ke Pemda Sleman sebanyak 10 kegiatan.
 - g) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur sebanyak 24 kali.
- 6) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
- a) Terlaksananya 16 kali rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, tersusunnya 1 buku laporan tindak lanjut penyelesaian penanganan pemerintahan umum, 1 buku hasil koordinasi tindak lanjut LHP urusan pemerintahan umum, terlaksananya 6 kali rapat koordinasi pimpinan daerah, terlaksananya forum komunikasi kebijakan pimpinan daerah.
 - b) Tersusunnya 5 buku laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, terlaksananya 6 kali rapat koordinasi tindak lanjut permasalahan pelaksanaan otonomi daerah, dan 1 dokumen kajian manajemen pemerintahan daerah.
 - c) Terlaksananya 1 paket Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - d) Terlaksananya 2 kali forum komunikasi pengadilan, kehakiman, kejaksaan dan kepolisian.
 - e) Tersusunnya 10 buah naskah kerjasama antar daerah dan lembaga, 4 buah naskah perjanjian tanah kas desa.
 - f) Terlaksananya koordinasi pemerintahan dan pimpinan wilayah kecamatan sebanyak 112 kali.



- 7) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a) Tersusunnya 1 dokumen keputusan bupati tentang target kinerja, 1 dokumen peraturan bupati tentang uang penghargaan.
 - b) Tersusunnya 1 dokumen pembinaan dan evaluasi tata hubungan kerja (1 OPD), pembinaan dan evaluasi tata naskah dinas di 7 OPD, 3 dokumen SOP, dan 1 dokumen hasil evaluasi implementasi SPM.
 - c) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan kelembagaan daerah menghasilkan 1 draf perda tentang OPD, 125 buku kelembagaan, 52 Draft perbup tentang uraian tugas, 1 Draft perbut tentang Anjab (2 OPD).
 - d) Tersusunnya 1 dokumen Tata hubungan kerja 1 OPD, 10 draft peraturan bupati tentang sistem dan prosedur.
 - e) Tersusunnya 1 dokumen Laporan IKM di 3 instansi/obyek, pembinaan ISO 9001:2000 di 3 OPD, 1 dokumen penyiapan materi keikutsertaan lomba citra bhakti abdi negara.
 - f) Tersusunnya mekanisme pengelolaan kantin Setda sebanyak 1 buku.
- 8) Program Kerjasama Pembangunan
 - a) Terlaksananya 4 kali koordinasi dengan instansi kabupaten yang berbatasan (Rakortas), tersusunnya 1 dokumen database permasalahan perbatasan dan 1 dokumen evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan serta terselesaikannya 2 permasalahan perbatasan di bidang pertanahan dan sumber daya air.
 - b) Tersusunnya 10 buah naskah kerjasama antar daerah dan lembaga, 4 buah naskah perjanjian tanah kas desa.
- 9) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM
 - a) Terlaksananya pengkajian 8 produk hukum.
 - b) Tersusunnya 13 buah raperda dan terlaksananya konsultasi dengan pakar 2 kali.



- c) Tersusunnya 86 buah Peraturan Bupati, 329 buah Keputusan Bupati.
 - d) Tersusunnya 13 buah Lembaran Daerah, 85 buah Berita Daerah, 250 buku Informasi Perundang-undangan, 250 buku Abstrak Peraturan perundang-undangan, 250 buku Warta Peraturan perundang-undangan, 200 buku Himpunan Peraturan perundang-undangan, terlaksananya pembinaan dan monitoring SJDH Hukum kabupaten dan kecamatan sebanyak 18 kali.
 - e) Terlaksananya 2 kali pembinaan Kadarkum, 2 kali pembinaan Pokmaskum, 2 kali pembinaan Pokjanal, 2 kali pembinaan PTUN, 5 kali sosialisasi produk hukum pusat dan daerah, 1 kali fasilitasi Forkom Supremasi Hukum.
 - f) Tersusunnya 13 draft raperda dan 113 SK Pimpinan DPRD.
 - g) Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen dan fasilitasi panitia khusus non raperda sebanyak 3 dokumen.
 - h) Terlaksananya rapat kerja/rakor DPRD selama 12 kali, tersusunnya risalah rapat sebanyak 145 buku.
 - i) Tersusunnya 11 draft raperda dan 60 SK Pimpinan DPRD.
 - j) Terlaksananya pembinaan dan penegakan perda di masyarakat sebanyak 23 kali.
- 10) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum
- a) Tersedianya informasi peraturan perundang-undangan yang lengkap.
 - b) Tersusunnya 20 buku peta permasalahan hukum, terlaksananya pemberian bantuan hukum perdata dan TUN, terlaksananya pencermatan terhadap Relas Panggilan Sidang 401 buah.
 - c) Terlaksananya penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara sebanyak 5 buah sengketa.
 - d) Terlaksananya studi lanjutan permasalahan hukum tentang legal drafting profesi/kuasa hukum dan SJDH hukum.



- e) Tersusunnya 7 draft rumusan kebijakan bidang sosial, keagamaan, pemberdayaan perempuan, lansia, anak dan narkoba.

11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Terselenggaranya 26 jenis pelayanan perijinan di UPT-PSA.
- b) Terfasilitasinya 2 kali Rapat Paripurna Istimewa.
- c) Terlaksananya 2 kali fasilitasi pendampingan kunjungan kerja panitia tetap.
- d) Terlaksananya 3 kali penjaringan aspirasi masa reses.
- e) Terlaksananya *public hearing* sebanyak 1 kali.
- f) Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemerintah, masyarakat di Jakarta untuk 427 orang.
- g) Terfasilitasinya pelayanan peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda.
- h) Terpeliharanya emplasement, ruang pertemuan dan pelayanan masyarakat sebanyak 1 paket.
- i) Terlaksananya evaluasi dan verifikasi proposal bantuan pembangunan fisik prasarana dasar permukiman di 17 kecamatan, distribusi bantuan prasarana dasar permukiman dan pengairan di 17 kecamatan, distribusi bantuan pasar desa di 5 kecamatan, cek lokasi permohonan bantuan aspal di 17 kecamatan dan evaluasi dan verifikasi proposal permohonan bantuan aspal di 17 kecamatan.
- j) Terlaksananya peninjauan ke lokasi kegiatan gotong royong sebanyak 50 kali.
- k) Terlaksananya 2 kali fasilitasi TMMD.
- l) Tersusunnya 3 draft hasil monitoring pembangunan.
- m) Terselenggaranya pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebanyak 4 kali, tersusunnya 5 buku laporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan, tersusunnya 5 buku data monografi kecamatan,



- terlaksananya pembinaan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan sebanyak 2 kali dan tersusunnya 1 Draft kriteria evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- n) Tersusunnya 1 dokumen kajian pengembangan kecamatan aspek administrasi dan pemerintahan, dan terlaksananya 1 kali studi orientasi kebijakan pengembangan kecamatan.
 - o) Terlaksananya pelayanan umum dan administrasi kependudukan di kecamatan selama 12 bulan.
 - p) Terbinanya kegiatan pelayanan umum dan administrasi sebanyak 51 kali.
 - q) Terselenggaranya rapat koordinasi administrasi kependudukan desa sebanyak 12 bulan.
 - r) Terlaksananya peninjauan lokasi perijinan (HO, IMB, IPPT) sebanyak 68 kali.
 - s) Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan kewenangan perindagkop di kecamatan tahun 2009 sebanyak 2 kali.
 - t) Terlaksananya pelayanan perizinan perdagangan meliputi SIUP sebanyak 1.237 buah, TDP 1.108 buah dan TDG 15 buah.
 - u) Terlaksananya pelayanan perizinan industri (TDI/IUI) sebanyak 80 izin.
 - v) Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 10 buku.
 - w) Terlaksananya studi orientasi pelaksanaan tugas Perindagkop sebanyak 1 kali ke Kabupaten Sidoarjo.
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
- a) Terlaksananya pelantikan anggota DPRD masa bhakti 2009-2014 dan penyusunan buku memori sebanyak 100 buku.
 - b) Terlaksananya pelantikan anggota DPRD antar waktu sebanyak 1 kali.
 - c) Terselenggaranya kunjungan kerja panitia anggaran, panitia musyawarah, badan kehormatan dewan dan badan legislasi sebanyak 10 kali.



- d) Terselenggaranya seminar dan pengiriman bimbingan teknis anggota dan pimpinan DPRD sebanyak 18 kali.
 - e) Terlaksananya kunjungan kerja komisi sebanyak 26 kali.
 - f) Terlaksananya pembinaan BPD dan LKD sebanyak 6 kali.
- 13) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- a) Tersusunnya 80 set Buku LKPJ Bupati TA 2008 kepada DPRD, 10 buku LPPD kepada pemerintah, dan terpublikasikannya naskah LPPD di 2 media massa.
 - b) Tersusunnya draft perbup tentang pelaporan pelaksanaan tugas SKPD kepada Bupati di 48 SKPD, terusunnya 48 buku Laporan hasil monev penyampaian laporan pelaksanaan tugas SKPD kepada Bupati.
- 14) Program Ektensifikasi dan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah:
- a) Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi berupa terlaksananya intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi sebanyak 79 kali.
 - b) Intensifikasi PBB berupa terlaksananya intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebanyak 189 kali.
 - c) Pendataan wajib pajak hotel dan restoran non pembuku berupa pendataan penagihan pajak restoran non pembukuan sebanyak 41 kali.
- 15) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Terselenggaranya diskusi antar pegawai Setda sebanyak 4 kali, 1 kali studi orientasi ke Kota Batam, mengikuti kursus, seminar, pelatihan dari 5 bagian, dan 13 kali bintek dan workshop di Dinas Kimpraswilhub dan Dinas Pertanian dan Kehutanan.
 - b) Terlaksananya forkom kehumasan 1 kali untuk 70 orang, forkom pimpinan dan aparat 1 kali untuk 70 orang, forkom sosialisasi kebijakan 2 kali untuk 140 orang, forkom keprotokolan 1 kali untuk 50 orang, workshop pengembangan pribadi 1 kali untuk 50



- orang, peningkatan kapasitas aparat kehumasan 6 kali untuk 18 orang.
- c) Terlaksananya pengiriman peserta bintek, workshop dan seminar aparat sekretariat DPRD sebanyak 30 orang.
 - d) Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, seminar dan pendampingan kunjungan kerja anggota DPRD sebanyak 32 kali.
 - e) Terlaksananya workshop, seminar dan lokakarya sebanyak 3 kali, bimtek pengelolaan barang sebanyak 1 kali, bimtek sebanyak 10 kali.
 - f) Terlaksananya pelatihan manajemen arsip untuk 33 orang.
 - g) bimtek, kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop berupa terlaksananya penilaian angka kredit pegawai fungsional penyuluh perindustrian untuk 4 orang.
 - h) Tersusunnya 50 buku identifikasi masalah IKM 4 komoditi.
 - i) Terlaksananya bimbingan penyuluhan terhadap industri kecil dan rumah tangga sebanyak 12 angkatan.
- 16) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah
- a) Tersusunnya profil desa sebanyak 235 buku.
 - b) Tersusunnya profil pemuda dan olahraga sebanyak 10 buku.
 - c) Tersusunnya data monografi kecamatan sebanyak 51 buku.
 - d) Terlaksananya pendataan bidang pendidikan dan kesenian sebanyak 6 buku.
 - e) Terlaksananya pendataan PMKS dan PSKS sebanyak 16 kali.
 - f) Terselenggaranya updating dan validasi data KB, sosial dan ketenagakerjaan serta data jiwa miskin di 17 kecamatan, 86 desa, 1.212 padukuhan.
 - g) Penyiapan 1 paket jaringan berbasis komputer/LAN dan penyusunan database P3BA 12 buku.
 - h) Tersusunnya data statistik kebudayaan dan pariwisata sesuai perkembangan sebanyak 100 eksemplar.



-
- i) Tersusunnya *database* dan profil Dinas Pol PP dan Tibmas berupa 75 buku.
 - j) Tersusunnya penyusunan profil usaha perdagangan Kabupaten Sleman berupa 600 buku.
 - k) Terlaksananya penyusunan buku panduan industri dan pengolahan data industri sebanyak 200 buku.
 - l) Tersusunnya profil industri menengah dan besar sebanyak 200 buku.
 - m) Tersusunnya profil pengembangan sentra industri kecil sebanyak 80 buku untuk 4 sentra.
 - n) Tersusunnya profil komoditi unggulan Kabupaten Sleman sebanyak 320 buku.
 - o) Terlaksananya pendataan 561 koperasi.
 - p) Terlaksananya pemetaan industri hasil tembakau sebanyak 10 buku.
 - q) Terlaksananya verifikasi nama-nama rupabumi di 17 kecamatan, tersusunnya 1 dokumen Gasetir Kabupaten Sleman sebagai bahan pembakuan nama rupabumi Kabupaten Sleman, dan 1 dokumen kajian sejarah nama dan pembentukan kecamatan dan desa.
 - r) Terlaksananya pengelolaan *website* Dinas Pol PP dan Tibmas selama 12 bulan.
 - s) Tersusunnya SIM Ketertiban.
- 17) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah dengan terlaksananya pembinaan arsip dan perpustakaan desa, sebanyak 47 kali
- 18) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
- a) Terlaksananya distribusi bantuan gotong royong 378 kali.
 - b) Terlaksananya koordinasi pengendalian dan monitoring pembangunan di wilayah sebanyak 54 kali.



- c) Terlaksananya pendampingan operasional PNPM 135 kali.
 - d) Terlaksananya pembinaan KIKM 3 kali.
 - e) Terlaksananya kegiatan lomba antar wilayah 54 kali.
- 19) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- a) Penerbitan Suara Parlemen, booklet, leaflet dan album kegiatan dewan sebanyak 10.000 eksemplar.
 - b) Pelayanan pers, dialog interaktif, keprotokolan dan *audio visual* kegiatan dewan 2004-2009 melalui dialog interaktif TV dan radio sebanyak 10 kali, pelayanan pers selama 12 bulan dan *audio visual* 1 paket.
 - c) Terpeliharanya media internet di sekretariat DPRD selama 12 bulan.
 - d) Terlaksananya penyusunan analisis dan informasi data pertanian dan kehutanan sebanyak 12 unit.
 - e) Terlaksananya pengelolaan web pertanian dan kehutanan melalui pengisian materi web selama 12 bulan, *re-design* web sebanyak 1 unit dan pemeliharaan sub domain sebanyak 1 unit.
 - f) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian dan kehutanan 11 kali.
 - g) Terlaksananya pembuatan peta potensi pertanian dan kehutanan dalam 5 sektor dan pembuatan dokumentasi visualisasi potensi pertanian dan kehutanan sebanyak 1 paket.
 - h) Tersusunnya informasi perkembangan sektor Perindagkop Kabupaten Sleman 100 buku.
 - i) Tersusunnya promosi potensi kerajinan berupa 3.000 *leaflet*.
 - j) Terlaksananya pembuatan leaflet, buku pegangan pengurus, buku pegangan pengawas pedoman SOP koperasi syariah, PP 9/1995, tata cara pendirian koperasi, UU No. 25/1992 sebanyak 7 macam 845 eksemplar.
 - k) Terpublikasinya Majalah Sembada 3 edisi 6.000 eks, tabloid Varia Sleman 4 edisi 8.000 eks, tabloid Akar 4 edisi 8.000 eks,

- leaflet* dan *booklet* 3 jenis 2.500 eks, operasional *audio visual* 96 kali, pembuatan sambutan 565 kali dan 1 paket penataan interior.
- l) Terlaksananya sosialisasi kebijakan di TV 35 kali, di radio 276 kali, *advetorial* di media massa 14 paket, dan pembuatan baliho 4 paket
 - m) Terlaksananya 6 kali evaluasi materi informasi melalui *cyber media*, 24 kali koordinasi dan fasilitasi pengisian materi, dan pengelolaan materi sub domain.
 - n) Terlaksananya 1 kali fasilitasi pameran potensi daerah di Kabupaten Sleman, 1 kali fasilitasi pameran potensi daerah di Alun-alun Utara.
 - o) Terlaksananya pembuatan 1 paket CD pembangunan, 1 paket CD promosi/potensi, 2 paket materi *videotron*, 450 kali penayangan informasi melalui *videotron*, pelayanan perpustakaan Setda 205 judul buku, 2 paket pembuatan data visual CD, dan pengelolaan data.
 - p) Terlaksananya media relation melalui fasilitasi di 15 media massa, 5 kali *presstour* (dalam daerah), 18 kali jumpa pers, 3 kali media gathering, 1 kali studi orientasi (luar daerah), 816 kali *press release*.
 - q) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi KIM di 18 kelompok dan jaringan informasi desa 1 kali.
 - r) Terlaksananya 445 pelayanan keprotokolan pimpinan, 95 kali pengaturan dan penerimaan tamu, dan 7 kali protokoler kegiatan kenegaraan.
 - s) Terlaksananya kegiatan layanan sms sebanyak 40 masalah.
- 20) Program Penataan penguasaan kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan terlaksananya pemantauan dan penyelesaian masalah pertanahan 61 kali
- 21) Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan dengan terlaksananya pemantauan dan penyelesaian masalah pertanahan sebanyak 61 kali



-
- 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan terselenggaranya Forkompanda Tk Propinsi sebanyak 1 kali, 1 kali Rakornas PAN, tersusunnya 1 dokumen evaluasi budaya kerja di 3 OPD (KPD, P2KPM, BPKKD), 2 kali di Kecamatan Berbah
- 23) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- a) Terfasilitasinya pelaksanaan pemilu sebanyak 10 kali.
 - b) Terlaksananya monitoring pelaksanaan kampanye sebanyak 17 kali.
 - c) Terlaksananya monitoring pelaksanaan pemilu di wilayah sebanyak 46 kali.
 - d) Terselenggaranya FKDM sebanyak 157 kali.
 - e) Terlaksananya pembinaan, monitoring pemilihan kepala desa/perangkat serta dukuh sebanyak 76 kali.
 - f) Terselenggaranya fasilitasi peningkatan pendidikan politik masyarakat sebanyak 104 kali.
 - g) Implementasi wawasan kebangsaan berupa terselenggaranya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 239 kali.
- 24) Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana dengan kegiatan pembinaan dan penanggulangan bencana berupa terlaksananya pembinaan dan penanggulangan bencana sebanyak 39 kali
- 25) Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman, HUT RI, syawalan Gubernur D.I.Y. dan karyawan, pisah sambut unsur pimpinan dan peresmian gedung sebanyak 1 paket
- 26) Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan terfasilitasinya premi JPKM selama 12 bulan untuk 600 orang
- 27) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- a) Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan desa berupa terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan desa sebanyak 37 kali.

- b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan berupa terpantaunya pelaksanaan pembangunan dan terselesaikannya permasalahan yang muncul sebanyak 150 kali.
 - c) Pembinaan penyusunan RPJMDesa berupa terlaksananya pembinaan penyusunan RPJMDesa sebanyak 3 kali.
 - d) Fasilitasi Forum Musyawarah Perkotaan berupa terlaksananya forum komunikasi perkotaan sebanyak 12 kali.
- 28) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- a) Pembinaan, pendataan dan fasilitasi penyelesaian masalah lingkungan hidup berupa terlaksananya pembinaan, pendataan dan fasilitasi penyelesaian masalah lingkungan hidup sebanyak 283 kali.
 - b) Monitoring dan evaluasi kegiatan penambangan berupa termonitornya kegiatan penambangan sebanyak 283 kali.
- 29) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan tersusunnya kajian kecamatan sebagai pusat kebudayaan sebanyak 20 buku dan kajian kecamatan sebagai pusat spiritual sebanyak 20 buku
- 30) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- a) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan kebudayaan 72 kali.
 - b) Terlaksananya pentas seni budaya di Berbah.
- 31) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pendataan kemiskinan sebanyak 20 kali
- 32) Program Pengembangan potensi daerah
- a) Fasilitasi pengembangan potensi daerah berupa terlaksananya pameran potensi wilayah sebanyak 34 kali.
 - b) Pembinaan dan monitoring UKM berupa terlaksananya pendataan dan monitoring UKM sebanyak 16 kali.
 - c) Pembinaan pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi berupa terbinanya dan terpantaunya koperasi sebanyak 7 kali.

-
- 33) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan terlaksananya evaluasi dan analisa dana penguatan modal Bank Pasar di 17 BUKP
 - 34) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a) Tersusunnya 1 dokumen kajian penembangan industri.
 - b) Terlaksananya pendataan, monitoring dan evaluasi industri kecil, perdagangan dan koperasi 39 kali.
 - 35) Program Penyiapan Sumberdaya, Sarana, Prasarana Usaha Ekonomi
 - a) Terlaksananya 6 kali monitoring dan evaluasi kelompok usaha masyarakat.
 - b) Terasilitasinya pengembangan Taman Kuliner dan Los Perdagangan Manggung melalui 12 kali.
 - c) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan Pasar Condongcatur.
 - d) Terlaksananya studi orientasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk potensi wilayah sebanyak 1 kali.
 - e) Terlaksananya fasilitasi penguatan modal (PM) pertanian melalui PM TPH sebanyak 166 kelompok, PM LUEP dan tunda jual sebanyak 42 kelompok, PM peternakan sebanyak 74 kelompok, PM perikanan sebanyak 135 kelompok, PM perkebunan sebanyak 16 kelompok, PM kehutanan sebanyak 2 kelompok.
 - f) Terlaksananya penyaluran kredit bagi IKM sebanyak 40 unit usaha, dan termonitornya kredit penguatan modal bagi IKM sebanyak 172 nasabah.
 - g) Tterlaksananya penyaluran kredit penguatan modal bagi koperasi dan IKM sebanyak 20 koperasi 10 PK, monev penguatan modal bagi koperasi dan UKM sebanyak 20 koperasi 20 pengusaha kecil.
 - h) Penunjangan dan monitoring pensertifikatan tanah UMK berupa terlaksananya pensertifikatan tanah bagi UMK sebanyak 100 bidang.

-
- 36) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- a) Terlaksananya kajian koordinasi dan pengiriman peserta Porseni pondok pesantren sebanyak 3 kali dan kajian koordinasi olahraga karyawan, masyarakat dan tri lomba juang sebanyak 4 kegiatan.
 - b) Terlaksananya pembinaan kegiatan olahraga dan pemasyarakatan olahraga sebanyak 61 kali.
- 37) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan lansia di bidang penghapusan KDRT sebanyak 1 kali
- 38) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak dengan terlaksananya 6 kali fasilitasi perlindungan anti kekerasan, terlaksananya penyelenggaraan lokakarya isu trafficking 1 kali dan fasilitasi penyelenggaraan forum penanganan KDRT 1 kali
- 39) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- a) Terlaksananya koordinasi PUG serta peningkatan peranan wanita sebanyak 3 kali.
 - b) Terlaksananya pendampingan pemberdayaan perempuan bagi kelompok PKK di 200 padukuhan.
 - c) Terlaksananya fasilitasi kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga sebanyak 65 kali.
- 40) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a) Terlaksananya fasilitasi kegiatan bagi penyandang cacat sebanyak 3 kali dan 6 kali monitoring dan fasilitasi kegiatan penyantunan sosial.
 - b) Terlaksananya hasil kajian pemberian dana bantuan kepada masyarakat sebanyak 12 kali dan seleksi anak asuh calon penerima bantuan di 17 kecamatan.

41) Program Peningkatan Kualitas Keagamaan

- a) Terlaksananya pembinaan rohani pejabat dan PNS sebanyak 2.400 orang, 10 kali pembinaan dan pengajian malam jum'at, 17 kali safari Jum'at, 18 kali tarling.
- b) Terlaksananya 4 kali sarasehan kerukunan umat beragama.
- c) Terlaksananya pelatihan imam dan khotib sebanyak 150 orang.
- d) Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi GPPA sebanyak 2 kali.
- e) Terlaksananya 12 kali koordinasi kegiatan BAZ dan 2 kali sosialisasi UU Zakat.
- f) Terlaksananya pembinaan dan evaluasi 14 pondok pesantren.
- g) Terlaksananya pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi 200 orang.
- h) Terlaksananya kajian pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di 9 desa.
- i) Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan sebanyak 73 kali.

42) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- a) Terlaksananya 6 kali koordinasi kegiatan BNK, 2 kali pelaksanaan hasil kajian tentang peran BNK.
- b) Terlaksananya sosialisasi pencegahan bahaya NAPZA sebanyak 22 kali.

43) Program Peningkatan Kualitas KB, KS dan KRR

- a) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan kelompok USEP/KUBE sebanyak 75 kali.
- b) Terlaksananya pembinaan keluarga sejahtera sebanyak 13 kali.

44) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- a) Tersusunnya 1 dokumen kajian pengembangan pangan lokal di Kabupaten Sleman.
- b) Terlaksananya 12 kali fasilitasi dan koordinasi ketahanan pangan
- c) Terlaksananya pembinaan dan kegiatan P3A sebanyak 37 kali.
- d) Terlaksananya pembinaan dan kegiatan pertanian sebanyak 115 kali.



-
- 45) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- a) Tersusunnya buku kuliner makanan tradisional Kabupaten Sleman.
 - b) Tersusunnya 1 dokumen evaluasi Pasar Hewan Gamping.
 - c) Terlaksananya pembinaan pemantauan makanan kadaluwarsa sebanyak 24 kali.
 - d) Terlaksananya pendataan dan pelaporan penggunaan gudang sebanyak 31 kali.
- 46) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- a) Terlaksananya fasilitasi pameran potensi daerah sebanyak 1 kali.
 - b) Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan dalam Kabupaten Ekspo di Jakarta 1 kali.
- 47) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a) Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 213 kali.
 - b) Terlaksananya pembinaan Hansip dan Linmas di kecamatan sebanyak 90 kali.
 - c) Terlaksananya pembinaan dan operasi penegakan peraturan daerah sebanyak 137 kali.
 - d) Terlaksananya pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh dan pengisian perangkat desa sebanyak 71 kali.
 - e) Terdatanya WNA/WNI keturunan dan OT sebanyak 3 kali.
- 48) Program Peningkatan Pembinaan Generasi Muda
- a) Terlaksananya kegiatan kajian, koordinasi dan monitoring sebanyak 3 kali, sarasehan dan dialog pemuda sebanyak 1 kali..
 - b) Terlaksananya kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi manajemen dan kepemimpinan pemuda sebanyak 4 kali, dan tersusunnya buku hasil kajian sebanyak 20 buku.
 - c) Terlaksananya pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan sebanyak 57 kali.



-
- 49) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan terlaksananya upaya penyehatan lingkungan sebanyak 1 kali
 - 50) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Terlaksananya pembinaan UKS sebanyak 3 kali.
 - b) Terlaksananya pembinaan TPKJM sebanyak 3 kali.
 - 51) Program Pembinaan PKL dan Asongan dengan terlaksananya pendataan dan pembinaan PKL sebanyak 65 kali
 - 52) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal dengan terlaksananya pembinaan pendidikan non formal sebanyak 2 kali
 - 53) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan terlaksananya pembinaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebanyak 6 kali
 - 54) Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan dengan terlaksananya pelatihan penyuluh pertanian sebanyak 3 kali, pelatihan penyuluh swakarsa sebanyak 2 kali, pelatihan pengelola P4S sebanyak 1 kali, dan penyusunan program penyuluh dengan metode PRA sebanyak 1 kali
 - 55) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a) Terlaksananya *Agro and Food Expo* sebanyak 1 kali, Hari Pangan sedunia sebanyak 1 kali, dan pameran potensi pembangunan sebanyak 1 kali.
 - b) Terlaksananya forkom pertanian dan kehutanan sebanyak 1 kali, forkom tiga bulanan sebanyak 20 kali, forkom penyuluh sebanyak 3 kali, dan forkom PMHP sebanyak 1 kali.
 - 56) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a) Terrealisasinya pemberian stimulan kepada kelompok berprestasi tingkat nasional sebanyak 3 kelompok, petugas/masyarakat pertanian tingkat nasional sebanyak 3 orang.
 - b) Terlaksananya kegiatan penunjang pertanian wisata melalui lomba burung berkicau tingkat kabupaten sebanyak 1 kali, lomba numbuk padi antar desa sebanyak 1 kali, lomba mancing tingkat

kabupaten sebanyak 1 kali, lomba ani-ani antar sekolah se-Kab. Sleman sebanyak 1 kali.

- c) Terlaksananya pemberdayaan kelompok sebanyak 8 paket, koordinasi tingkat koordinat sebanyak 8 unit, demplot sebanyak 7 unit, dan fasilitasi perjalanan tetap petugas lapang sebanyak 12 bulan.

Berdasarkan perhitungan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah, rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 95,58% dan keluaran kegiatan 101,20% meliputi 56 program yang terdiri dari 256 kegiatan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman masih menghadapi tantangan antara lain masih belum optimalnya kinerja organisasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2009 difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum pada sub manajemen pemerintahan umum telah menghasilkan produk hukum dengan optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui *public hearing*, konsultasi pakar dan studi banding. Hasil perumusan regulasi dalam bentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah meliputi:



Tabel 4.13. Rumusan Regulasi Tahun 2009

No	Uraian	Keterangan
1.	Peraturan Daerah sebanyak 13 buah, meliputi:	
a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009	Nomor 1 tahun 2009
b.	Retribusi Obyek Wisata	Nomor 2 tahun 2009
c.	Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi	Nomor 3 tahun 2009
d.	Retribusi Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi	Nomor 4 tahun 2009
e.	Retribusi Pelatihan Kerja Swadana Pada Balai Latihan Kerja	Nomor 5 tahun 2009
f.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008	Nomor 6 Tahun 2009
g.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Nomor 7 tahun 2009
h.	Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan	Nomor 8 tahun 2009
i.	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman	Nomor 9 tahun 2009
j.	Perubahan APBD Tahun 2009	Nomor 10 tahun 2009
k.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Nomor 11 tahun 2009
l.	APBD 2010	Nomor 12 tahun 2009
m.	Dana Penguatan Modal	Nomor 13 tahun 2009
2.	Raperda	
a.	Kerjasama Desa	Dibahas di Bagian Hukum
b.	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Proses pengundangan
c.	Peraturan Desa	Proses pengundangan
d.	Tatacara Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Duku	Dipending di DPRD
e.	Tatacara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Bagian/Kepala Urusan	Proses pengundangan
f.	Pendapatan Desa	Dibahas di bagian Hukum
g.	Pengelolaan Keuangan Desa	Dibahas di Bagian Hukum
h.	Izin kerja Asisten Apoteker	Dibahas di Bagian Hukum
i.	Retribusi Izin Kerja Asisten Apoteker	Dibahas di Bagian Hukum
j.	SIUP dan Retribusi SIUP	Proses evaluasi Gubernur
k.	Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
3.	Peraturan Bupati sebanyak 86 buah	
4.	Keputusan Bupati sebanyak 329 buah	
5.	Perjanjian Kerjasama sebanyak 26 buah	
6.	Keputusan Sekretaris Daerah sebanyak 112 buah	

Sumber: Bagian Hukum, Setda, 2009

Pembentukan produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan, antara lain pembentukan peraturan daerah tentang Retribusi Obyek Wisata, Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Retribusi Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Retribusi Pelatihan Kerja Swadana Pada Balai Latihan Kerja, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan serta Dana Penguatan Modal.

Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan produk hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku. Perkembangan jenis, jumlah, pendokumentasian dan pemasyarakatan produk hukum pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.14. Penetapan Produk Hukum Daerah

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Peraturan Daerah	8	15	15	8	13
2.	Keputusan Bupati / Peraturan Bupati	21	24	27	45	86
3.	Keputusan Bupati	254	465	548	336	329
4.	Instruksi Bupati	3	1	1	-	-
5.	Perjanjian Kerjasama	20	34	40	26	70
6.	Keputusan Sekretaris Daerah	-	-	-	103	112

Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah

Tabel 4.15. Pendokumentasian dan Pemasyarakatan Produk Hukum

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kadarkum	1	1	2	2	2
2.	Pokjanal	1	1	2	2	2
3.	SJDI	10	10	10	10	18

Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah

Dalam rangka menopang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah telah mengambil langkah pengaturan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, dengan Peraturan



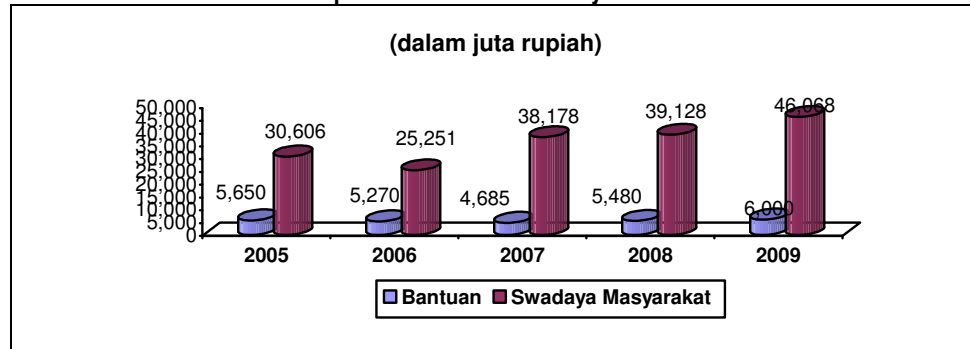
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Langkah kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan secara berkesinambungan antara lain melalui penentuan target kinerja organisasi perangkat daerah, yang tingkat pencapaiannya menjadi dasar pemberian penghargaan kepada instansi.

Penerapan ISO 9001:2000 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2009, 14 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000. Kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, pada 3 unit organisasi perangkat daerah yaitu; UPT-PSA, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Pengelolaan Pasar setelah sebelumnya pada tahun 2008 sudah dilakukan survey IKM pada 3 organisasi perangkat daerah yaitu; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal, dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

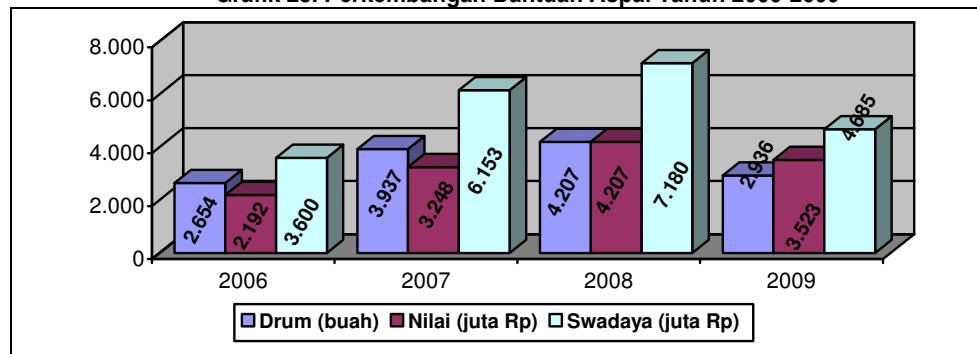
Untuk meningkatkan kelancaran kegiatan pembangunan dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilakukan kegiatan pemberian bantuan gotong royong pada 86 desa, bantuan aspal pada 17 kecamatan. Program pemberian bantuan pembangunan tersebut telah mampu menggali partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Grafik 27. Rekapitulasi Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2005-2009



Sumber: Sekretariat Daerah

Grafik 28. Perkembangan Bantuan Aspal Tahun 2006-2009



Sumber: Sekretariat Daerah

Kebijakan untuk mengembangkan perekonomian daerah diarahkan pada upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat antara lain melalui program *community development* berupa pemberian modal usaha bagi kelompok ekonomi masyarakat dan penguatan modal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) serta penyertaan modal pada BUMD dan BUKP.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang sosial kemasyarakatan antara lain melalui upaya peningkatan kualitas keagamaan dengan pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama dan sarasehan kerukunan umat beragama.

Salah satu wujud transparansi informasi kepada masyarakat telah dilaksanakan pengembangan layanan informasi kepada masyarakat berbasis SMS (*Short Message Service*), publikasi kebijakan Pemerintah

Kabupaten Sleman melalui dialog interaktif, publikasi di media massa, penerbitan buku dan majalah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam rangka tertib administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan batas wilayah perbatasan melalui pemasangan dan pemeliharaan patok batas. Kebijakan ini sangat strategis untuk pengamanan potensi di wilayah perbatasan, serta pembakuan nama rupa bumi melalui penyusunan data base toponimi dan gasetir di seluruh wilayah kecamatan.

Untuk menjaga kondisi keamanan yang kondusif diselenggarakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara berkelanjutan. Forum ini bertujuan untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di daerah dan guna penyelesaian masalah kamtibmas di Kabupaten Sleman. Demikian pula di tingkat Kecamatan forum ini diselenggarakan melalui Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan umum yaitu semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadap hukum belum optimal. Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum

- 2) Pada level regulasi masih adanya inkonsistensi aturan dari pusat sehingga menyulitkan daerah dalam implementasinya misalnya UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai tindaklanjutnya. Solusi yang ditempuh dengan melakukan konsultasi kepada Departemen Dalam Negeri.

- **Administrasi Keuangan Daerah**

- a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan
 - b) Penyediaan jasa langganan listrik, telekomunikasi, media cetak
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan
 - e) Penyediaan ATK, barang cetakan dan penggandaan
 - f) Fasilitasi rapat dan tamu
 - g) Pengelolaan kepegawaian
 - h) Konsultasi dan koordinasi
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, Workshop, seminar dan Lokakarya
 - b) Pelatihan _rofessional petugas PBB
 - c) Pembinaan bendahara
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kerja SKPD
 - a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPKKD



- c) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran
- d) Pendampingan dan implementasi SIPKD dan SIKD
- e) Rekonsiliasi Bank
- f) Penyusunan Raperda/Raperbup bidang keuangan
- 5) Program Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
 - a) Penyusunan laporan keuangan dan publikasi laporan keuangan daerah tahun 2008
 - b) *Annual Report*
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
 - a) Evaluasi APBD tahun 2009
 - b) Penyiapan materi sisdu pengelolaan keuangan
 - c) Penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah
 - d) Penyusunan laporan penyerapan anggaran dan evaluasi penyerapan anggaran
 - e) Analisis kelayakan modal, pengendalian kredit dana penguatan dan rekonsiliasi modal dan evaluasi dana penguatan modal
 - f) Rekonsiliasi modal
 - g) Pengendalian dan koordinasi SPJ, pendapatan dan belanja SKPD dalam pelaksanaan APBD
 - h) Klasifikasi dan penyusunan SK bendahara
 - i) Penelitian SPM dan penerbitan SP2D
 - j) Penelitian data dan register SKPP
 - k) Penelitian daftar gaji dan penerbitan realisasi gaji pegawai
 - l) Pengelolaan dana perimbangan
 - m) Pelaporan SPT masa dan SPT tahunan (PPh 21)
 - n) Manajemen kas daerah
 - o) Operasional pos bantuan keuangan
 - p) Perencanaan keuangan daerah



- q) Pengadaan kendaraan dinas
- r) Pengadaan peralatan dan mesin
- s) Pengadaan tanah
- t) Pengadaan mebeler dan perlengkapan
- u) Pengadaan bahan pakaian kerja dan perlengkapannya
- v) Pengadaan plakat dan kalender pemda
- w) Pengolahan data hasil sensus barang daerah
- x) Pengelolaan aktiva tetap dan cek fisik
- y) Penyusunan RKBu/RTBU, RKPBU dan RTPBU
- z) Penghapusan aktiva tetap
- aa) Pendistribusian barang daerah
- bb) Evaluasi laporan barang
- cc) Pengkajian dan pemanfaatan aset daerah
- aa) Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah
- ee) Evaluasi penguatan modal
- ff) Pengembangan dan pemeliharaan data base pengguliran dana pengembalian modal
- gg) Pengelolaan Stadion Maguwoharjo
- ee) Tindak lanjut Peraturan Presiden tentang Gaji 13
- ii) Penyusunan *Business Plan* Stadion Maguwoharjo
- jj) Penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah
- 7) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan
 - a) Evaluasi PAD
 - b) Penetapan pajak daerah
 - c) Analisis hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pajak daerah
 - d) Penyediaan Surat Ketetapan Pajak Penerangan Jalan
 - e) Pendaftaran calon Wajib Pajak (WP) dan Pendataan WP daerah
 - f) Pemeriksaan WP daerah

- g) Pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah
- h) Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang
- i) Bagi hasil pajak
- j) Pengelolaan PBB
- k) Pembinaan dan Operasional BPHTB
- l) Penagihan pajak daerah
- m) Forum komunikasi pengelolaan pendapatan
- n) Pemantauan WP daerah
- o) Intensifikasi pajak reklame
- p) Pembinaan wajib pajak
- q) Pengembalian PHR

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan administrasi keuangan dan kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Terlaksananya penataan 1.500 boks arsip, pengolahan arsip dan daftar inventarisasi 4 kali
 - b) Terlaksananya pembayaran biaya langganan penerangan jaan umum selama 12 bulan
 - c) Terlaksananya pembayaran tunjangan pengelola keuangan dan barang bagi 28 orang
 - d) Terlaksananya pembayaran honor tenaga kebersihan bagi 6 orang
 - e) Terlaksananya penyediaan ATK, barang cetakan dan penggandaan sebanyak 3 jenis
 - f) Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat tamu selama 12 bulan
 - g) Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian bagi 136 pegawai
 - h) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi selama 12 bulan



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan terrealisasinya pemeliharaan peralatan kantor selama 12 bulan
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Terlaksananya kursus 2 kali, sosialisasi 7 kali, bimtek 3 kali, seminar 4 kali dan diklat 3 kali
 - b) Terlaksananya pelatihan profesionalisme petugas pengelola PBB dilaksanakan sekali
 - c) Terlaksananya pembekalan dan bimtek administrasi keuangan bagi 150 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kerja SKPD
 - a) Tersusunnya dokumen RKA, DPA dan program kerja sebanyak 7 buku
 - b) Tersusunnya program kerja SKPD, laporan tahunan dan laporan kinerja sebanyak 14 buku, dan data tentang BPKKD sebanyak 80 data
 - c) Terlaksananya penatausahaan keuangan 3.465 SPJ dari SKPD
 - d) Terlaksananya fasilitasi penerapan SIPKD dan regional SIKD
 - e) Terlaksananya rekonsiliasi bank menghasilkan 12 dokume
 - f) Tersusunnya 7 raperda bidang keuangan
- 5) Program Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
 - a) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan publikasi laporan keuangan di 3 media massa
 - b) Tersusunnya *Annual Report* 500 buku dan 100 keping CD
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Tersusunnya laporan realisasi dan evaluasi APBD sebanyak 22 buku
 - b) Terlaksananya Evaluasi penguatan modal 12 kali



- c) Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah menghasilkan 1 draft perbup
- d) Tersusunnya laporan realisasi penerimaan daerah menghasilkan 12 laporan
- e) Tersusunnya laporan penyerapan anggran dan evaluasi penyerapan 6 laporan
- f) Terlaksananya Rekonsiliasi modal 12 dokumen
- g) Tersusunnya analisis kelayakan modal 12 dokumen
- h) Terlaksananya Verifikasi, klarifikasi, pengesahan, dan arsip SPJ dari instansi sebanyak 3.465 SPJ
- i) Terlaksananya klarifikasi penyusunan SK Bendahara menghasilkan 60 set SK Bendahara
- j) Terlaksananya Penelitian 1.777 SPM Gaji dan pengkoreksian 1.777 SP2D
- k) Terlaksananya Penelitian data dan register 500 SKPP
- l) Terlaksananya Penelitian 13.500 daftar gaji dan penerbitan realisasi gaji pegawai
- m) Terlaksananya Pengelolaan dana perimbangan selama 12 bulan
- n) Terlaksananya Pelaporan SPT masa tahun 2009 dilaksanakan sekali
- o) Terlaksananya Manajemen kas daerah selama 12 bulan
- p) Terlaksananya Operasional pos bantuan selama 12 bulan
- q) Terlaksananya Perencanaan keuangan daerah menghasilkan 250 buku Perda APBD 2009, 250 buku Perbup APBD 2009, 420 DPA 2009, 90 Anggaran Kas, 400 SHBJ 2009, 150 juklak APBD, 100 instruksi PAPBD 2009, 250 Perda PAPBD 2009, 250 Perbup PABD 2009, 90 Anggaran Kas PAPBD 2009, 420 DPA PAPBD 2009, 225 buku Perda APBD Tahun 2010, dan 200 Buku Perbup APBD 2010



- r) Terlaksananya Pengadaan 100 Kendaraan dinas, 22 jenis peralatan dan mesin, 3 lokasi tanah, 3 jenis pakaian dinas, 21 jenis mebelair, 240 plakat, dan 3.000 kalender
- s) Terlaksananya Perbaikan kendaraan dinas dan cek fisiknya, serta perbaikan gedung di luar kewenangan instansinya sebanyak 6 kali
- t) Terlaksananya Penyusunan data kebutuhan barang dan pemeliharaan bagi 39 instansi
- u) Terlaksananya Penghapusan aktifa tetap sebanyak 2 jenis bidang aset
- v) Terlaksananya Pendistribusian barang untuk 39 instansi
- w) Terlaksananya Evaluasi barang daerah 2 kali
- x) Terlaksananya Pengolahan data hasil sensus barang daerah dilaksanakan dalam 1 paket pekerjaan
- y) Penyusunan laporan pengkajian dan pemanfaatan aset daerah 4 bidang
- z) Terlaksananya penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah menghasilkan 4 sertifikat hak pakai tanah
- aa) Terlaksananya pengkoreksian 156 daftar gaji sebagai tindak lanjut perpres gaji 13
- bb) Terlaksananya analisis kelayakan modal dan pengendalian kredit dana penguatan modal dilaksanakan dalam 1 paket kegiatan
- cc) Terlaksananya penyusunan kajian pengembangan stadion maguwoharjo menghasilkan 1 dokumen
- dd) Terlaksananya penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah menghasilkan 8 perjanjian kerjasama
- ee) Terlaksananya pemeliharaan stadion maguwoharjo selama 12 bulan
- 7) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan
 - a) Terlaksananya evaluasi PAD Rp. 149.153.336.060,-

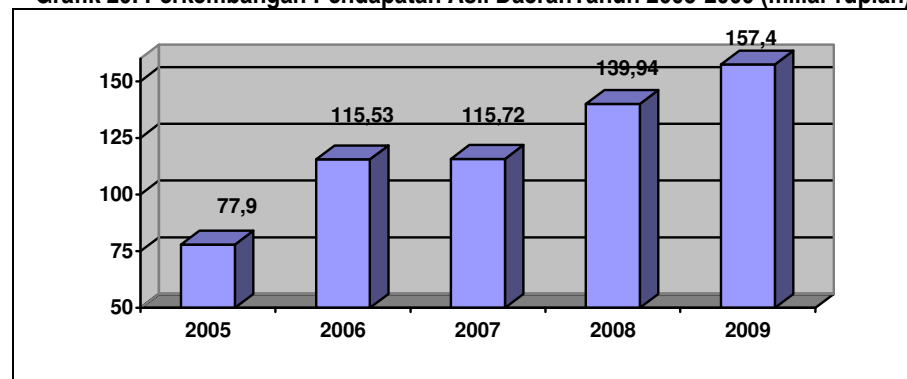


- b) Terlaksananya penetapan pajak daerah dengan penerbitan 23.493 Surat Ketetapan Pajak Daerah
- c) Terlaksananya pengelolaan titik reklame 96 lokasi
- d) Terlaksananya pencetakan ketetapan penagihan pajak penerangan jalan umum 3.100.669 lembar
- e) Terlaksananya pendaftaran calon wajib pajak dan Pendataan wajib pajak daerah 23.493 WP
- f) Terlaksananya pemeriksaan 156 Wajib Pajak daerah
- g) Terlaksananya pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah 87 WP.
- h) Terlaksananya operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang selama 365 hari.
- i) Terlaksananya bagi hasil pajak Rp. 58.885.803.108,-
- j) Terlaksananya intensifikasi pemungutan dan sosialisasi PBB di 17 kecamatan.
- k) Terlaksananya pembinaan Notaris dan Camat dalam operasional penanganan BPHTB di 17 kecamatan.
- l) Terlaksananya penagihan pajak daerah 16.505 ketetapan pajak
- m) Terlaksananya forum komunikasi pengelolaan pendapatan 4 kali
- n) Terlaksananya pemantauan 155 WP daerah
- o) Terlaksananya intensifikasi pajak reklame 288 WP
- p) Terlaksananya pembinaan wajib pajak 12 kali
- q) Terlaksananya pengembalian PHR 1 kali

Berdasarkan perhitungan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan administrasi keuangan daerah, rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 84,96% dan keluaran kegiatan 101,35% meliputi 7 program yang terdiri dari 72 kegiatan.

Pengelolaan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 11,09% dari Rp139.942.595.127,43 pada tahun 2008 menjadi Rp 157.399.974.582,84 pada tahun 2009. Kenaikan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Grafik 29. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2009 (miliar rupiah)



Sumber: BPKKD

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh melalui penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, pengelolaan dana perimbangan, dan penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui *website* Pemerintah Kabupaten Sleman dan penyusunan *annual report* terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mendukung upaya peningkatan ekonomi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat telah dilakukan analisis kelayakan modal, pengendalian kredit dana penguatan modal dan rekonsiliasi modal serta evaluasi dana penguatan modal, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem akuntansi dan komputerisasi pengguliran dana.

Untuk mendukung tertib administrasi asset daerah, pemerintah melakukan pengendalian asset daerah pada 39 instansi berupa pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil sensus barang daerah. Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. Pengadaan barang daerah berupa tanah antara lain pembebasan tanah dan pengurusan administrasi tanah untuk bangunan Jembatan Randusongo dan Balong, Jalan Evakuasi Kaliadem, Puskesmas Tempel, SMA N 1 Turi, serta Embung Serut. Guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana kerja dilakukan pengadaan dan pendistribusian barang kepada SKPD berdasarkan data kebutuhan barang berupa kendaraan dinas terdiri dari 6 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda dua, dan 4 dump truk untuk operasional kebersihan pasar.

c. Permasalahan dan Solusi

Peraturan Perundang-undangan yang dari Pemerintah Pusat sering tumpang tindih antar kementerian sehingga menimbulkan multi tafsir. Solusi yang ditempuh adalah koordinasi dengan BPK atau Pemerintah Pusat.